HADIRI PEMBINAAN KEHUMASAN SMA, SMK, DAN SLB NEGERI SE-KALBAR, OMBUDSMAN KALIMANTAN BARAT TEKANKAN PENTINGNYA STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Jum'at, 13 November 2026 - kalbar

PONTIANAK - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, Tariyah menjadi narasumber dalam kegiatan Pembinaan Kehumasan di Lingkungan SMA, SMK, dan SLB Negeri di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, pada 10-12 November 2026, di Balai Serumpun Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, dengan jumlah peserta sebanyak 427 orang yang berasal dari seluruh SMA dan SMK Negeri se-Kalimantan Barat. Dalam kegiatan tersebut, Tariyah menyampaikan materi bertema "Mewujudkan Pelayanan Publik yang Inklusif, Humanis, dan Bebas Maladministrasi" yang membahas maladministrasi dan standar pelayanan publik.

Pada pemaparannya, Tariyah menegaskan bahwa satuan pendidikan merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik karena menjalankan misi negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta menggunakan sumber daya negara dalam penyelenggaraannya. Menurutnya, pelayanan publik di sekolah tidak hanya berkaitan dengan proses belajar mengajar, tetapi juga mencakup pelayanan barang, jasa, dan administrasi yang diberikan kepada masyarakat. "Sekolah merupakan pelayanan publik karena menggunakan uang negara dan melaksanakan misi negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Tariyah.

Tariyah menjelaskan, penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pendidikan melibatkan berbagai entitas, mulai dari Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, hingga siswa. "Masing-masing memiliki peran dalam memastikan layanan pendidikan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku. Hakikat pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat, sehingga penyelenggara pendidikan perlu memastikan adanya standar pelayanan yang jelas, adil, profesional, inklusif, dan humanis sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya maladministrasi" jelas Tariyah.

Ia juga menekankan bahwa kualitas pendidikan memiliki hubungan erat dengan terbentuknya peradaban. Karena itu, penyelenggara pendidikan diharapkan tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek pembelajaran, tetapi juga memastikan setiap peserta didik memperoleh pelayanan yang layak dan berkeadilan. "Tidak ada peradaban dimulai dengan cara lain kecuali dengan pendidikan," tuturnya.

Melalui kegiatan pembinaan tersebut, Ombudsman Kalbar mendorong penguatan pemahaman para penyelenggara pendidikan mengenai pelayanan publik, standar pelayanan, serta potensi maladministrasi di lingkungan satuan pendidikan. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi SMA, SMK, dan SLB Negeri di Kalimantan Barat untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, humanis, dan bebas maladministrasi. (ORI-Kalbar)